PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER SINAU 3

MEMPERKOKOH PEREKONOMIAN BANGSA DENGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

YOGYAKARTA
04 SEPTEMBER 2014

Seminar Nasional & Call Paper Akuntansi, Ekonomi, dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Timur

SINAU 3
Seminas & Call For Paper UPN Veteran
2014

SAMBUTAN PANITIA SEMNAS DAN CALL PAPER
SiNAU ke 3: AKUNTANSI, BISNIS & MANAGEMEN, DAN EKONOMI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Timur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Yth. Bapak Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X
Yth. Ibu Rektor UPN"Veteran" Yogyakarta
Yth. Bapak Dr. Nurdiono,M.M.,Ak.,C.A.,C.R.S.,BAP
Yth. Bapak Dr. cand. Bogat Agus Riyono, M.Sc.
Yth. Bapak Dr. cand. Sutoyo, M.Si.
Yth. Bapak Ir. Milawarma, M.T.
Yth. Bapak Drs. Suryono, M.M.
Yth. Bapak Prof. Jogiyanto Hartono, M.B.A.
Prof. Dr. Unti Ludigdo (UB),
Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si. Ak.(Undip),
Dr. Wisnu Untoro, M.Si. (Dekan FE UNS),
Dekan FE UPNV Yogyakarta, Dekan FE UPNV Jakarta, dan Dekan FE UPNV Jatim.

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan segala anugerah serta kekuatan, sehingga kita senantiasa diberikan semangat untuk terus memperbaiki diri guna mewujudkan pengabdian sebagai masyarakat akademik yang memiliki kepedulian atas berbagai permasalahan bangsa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi pencerahan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuannya seperti sekarang ini.

Semnas dan Call Paper ini bertujuan untuk mengkaji perekonomian bangsa yang kokoh, mengkaji bisnis dan investasi yang dapat memperkokoh perkonomian bangsa, mengkaji fondasi transparansi dan akuntabilitas publik, mengkaji dalam bidang Akuntansi, Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Tata Kelola, Keuangan, Kebijakan dan Pendidikan Ekonomi-Manajemen-Akuntansi, Sektor Privat & Bisnis, Sektor Publik, Perpajakan, Auditing, Perbankan, Syariah, Asuransi, Investasi, Sistem Informasi Manajemen/ Akuntansi, UMKM, Pengentasan Kemiskinan, Pariwisata, Ecogrowth, Ekonomi Budaya, CSR, CG (*Corporate Governance*), GG (*Government Governance*), Akuntansi Migas & Mineral, Ekonomi Mineral, Manajemen: Mineral, Migas, & Panas Bumi, Manajemen Bencana, Manajemen Risiko, Tata Kota dan semua permasalahan dalam perekonomian.

Semnas dan Call Paper ini diikuti oleh praktisi dan akademisi dari Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia baik prodi akuntansi, bisnis, ekonomi, dan managemen dengan jumlah naskah yang masuk lebih dari 160 naskah.

Akhir kata, semoga semnas dan call paper ini bermanfaat dan saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya peserta seminar dan *call for paper* serta seluruh pelaksana kegiatan atas peran sertanya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

Sampai bertemu dalam forum SiNAU berikutnya.

Wassalammualaikum wr wb,

Yogyakarta, 04 September 2014

Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak., C.A.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta v

Sambutan Panitia Semnas & Call Paper Sinau Ke 3: Akuntansi, Bisnis & Managemen, dan Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Timur vii

Daftar Isi ix

AKUNTANSI

Perusahaan dalam Perspektif Sektor Industri di Asean
Jogiyanto Hartono M, Efraim Ferdinan Giri dan Sri Suryaningsum 3

Kebijakan *E-Procurement:* Peningkatan Integritas, Transparansi dan Efektifitas pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Propinsi Papua
Meinarni Asnawi dan Yuliana Waromi 11

Struktur Kepemilikan *Managerial* dan *Institusional* Terhadap Tata Kelola Perusahaan
Sujatmika dan Sri Suryaningsum 21

PSEUDO Profit Center Sebagai Paradigma Sistem Pengendalian Manajemen Bank di Indonesia
Edy Sukarno 29

Penguatan Ekonomi Kebudayaan DIY Berbasis Anggaran Keuangan Danais
Sri Suryaningsum, Moch. Irhas Effendy, Raden Hendry Gusaptono dan Sultan 39

Aplikasi Model Audit Pertanggungjawaban Sosial yang Efektif pada Organisasi Sektor Publik di Industri Air Minum dalam Kemasan dengan Pendekatan *Human Centered Design*
Priyo Suprobo, Diana Suteja, Soegeng Soetedjo dan Basuki 45

Kos *Stickiness* Pada Sektor Perbankan
Windyastuti 55

Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, *Debt To Equity Ratio* dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*
Dewi Nur Khomariyah dan Satria Yudhia Wijaya 63

Program Kreativitas Mahasiswa
Noto Pamungkas, Sri Luna Murdianingrum dan Marita 73

Analisis Persepsi Lulusan Akuntansi Terhadap Pilihan Karir di Bidang Akuntansi
Toar Andreas Sanger dan Supatmi 77

Pengaruh *Familiarity* dan *Experience* Pada Tipe Alternatif Komunikasi dalam Tim Audit
Dra. Sri Luna Murdianingrum, M.Si dan Kaharudinsyah Leon Sakti, SE., Ak., M.Sc., C.A 87

Analisis Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap *Return* Saham dengan Persistensi Laba Sebagai Variabel *Intervening*
Euis Yuningsih dan Nurmatias 95

Analisis Penerapan Efisiensi Biaya Upah Tenaga Kerja Perusahaan Pengguna Jasa *Outsourcing* pada PT. Panggung Electric Citrabuana
Diana Suteja S.E., M.M.,Ak dan Winda Trisnandawati 107

Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan SPI, dan Ketaatan pada Perundang-Undangan Dianalisis dari Opini Auditor
Sucahyo Heriningsih dan Rusherlistyani 115

Analisis Kompetensi lulusan Universitas untuk Menempati Posisi Internal Audit : Sudut Pandang dari Praktisi Internal Auditor
Hansiadi Yuli Hartanto dan Lisia Apriani 123

Pengaruh *Value Based Management* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Pemoderasi
Lita Yulita Fitriyani, S.E., M.Si., Ak., C.A dan Gede Sony Wirawan, S.E. 133

Penganuh Biaya *Corporate Social Responsibilty* Terhadap Kinerja Keuangan
Ruth Nathania, Yeterina Widi Nugrahanti dan Ari Budi Kristanto 141

Kajian Empiris Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Ichsan Setiyo Budi dan Dwi Sudaryati 153

Pengaruh Partisipasi Masyrakat dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Melalui *Good Government Governance* Sebagai *Variabel Moderating* (Survey pada Pemda Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur)
M.Rasyidin Aziz dan Bambang Jatmiko 159

Pengaruh Konservatisme dan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Asimetri Informasi
Raden Rangga Jati, SE. dan Marita, SE., M.Si., Ak. 167

Reaksi Pasar di Sekitar Tanggal Pengumuman Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dan Opini Audit Wajar dengan Pengecualian
Winny Winarto dan Yeterina Widi Nugrahanti 177

Pengembangan Usaha Kecil Melalui IPTEK Sistem Pemasaran *Online*
Dwi Sudaryati dan Sucahyo Heriningsih 185

Pengembangan Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Liya Yulita Fitriyani dan Kaharudinsyah Leon Sakti 191

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Sebelum Pemberlakuan Kewajiban Penggunaan IFRS
Putri Ayu,Sri Astuti dan Sujatmika 197

Perbedaan Independensi Auditor Terkait Tenur Audit
Hari Kusuma Satria Negara 205

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemampuan Pemenuhan Kewajiban Bank di Indonesia
Bambang Agus Pramuka 215

Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Jubaedah dan Hesty Herawati 223

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Pengadaan Barang
Nurmitasari Dwi Syaputri, Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE dan Nurul Herawati, S.E., M.Si. 229

Formulasi Strategi Bisnis pada PT Abattoir Surya Jaya Menggunakan *Internal Eksternal Matriks*
Tamadoy Thamrin Hasibuan, Rida Perwita Sari dan Ageng Kadharman 237

Model Perancangan *Good Governance Goverment* untuk Mewujudkan Kinerja Pemeritahan yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi pada Pemerintahan Kota Depok
Bambang Jatmiko, SE., MSi.,Dr. 249

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kepadatan Penduduk dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi di Jawa dan Bali
Islamiah Kamil dan Nurlis 261

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Auditor Eksternal dalam Mendeteksi Indikasi Kecurangan (Perspektif Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur)
Habi Bullah, Dr. Tarjo, S.E., M.Si., CFE dan Robiatul Auliyah, S.E., Msa 273

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Publik Kabupaten/Kota di Indonesia
Khoirul Aswar 281

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di Wilayah Jabodetabek dan Bandung 289
Nurlis dan Islamiah Kamil

BISNIS DAN MANAJEMEN

Peringkat Penjamin Emisi, *Underpricing*, dan Kinerja Pasar Sekunder Saham IPO di Bursa Efek Indonesia 303
Arni Utamaningsih,

Pengaruh Modal Manusia dan Pembelajaran Organisasi Terhadap Kinerja yang Dimediasi oleh Kompetensi Organisasi (Studi Empiris pada PTS Kopertis V Yogyakarta) 311
Winarno dan Sri Wahyuni Widiastuti

Skala Motivasi Kerja: Validasi Pengukuran dalam Konteks Indonesia 321
Devani Laksmi Indyastuti

Analisis *Price Consciousness* (Kesadaran Harga) Terhadap *Repurchase Private* Label 325
Diana Triwardhani, SE, MM dan Yuliniar , SE, MM

Managemen Lingkungan Sehat dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi bagi Wanita Pekerja Rumah Tangga 333
Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Dr. Wiwik Dewi Sugiarti, M. Kes.

Akselerasi Proses Transfer *Knowledge* Menggunakan Pendekatan Model Seci yang disesuaikan dengan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa "Slametan" (Studi Pada Pengusaha Kerupuk Tuntang Kab Semarang) 337
Linda Ariany Mahastanti, Yeterina Widi Nugrahanti dan Sri Hartini

Motivasi dan Budaya Perempuan dalam Mekanisme Pemberdayaan Perempuan 347
Tri Mardiana, Sri Kussujaniatun, Sucahyo Heriningsih, Marita dan Sadi

Pengaruh Iklim Organisasi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 353
Anik Herminingsih dan Indri Wulandari

Memperkuat Pertahanan dan Ketahanan Melalui Pemuda Sebagai Wirausahawan Mandiri 365
Meilan Sugiarto, Winarno, Sutoyo dan Rudi Wibowo

Identifikasi Pengaruh Rasio Camel Terhadap *Return* Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pasca Krisis Keuangan Global 373
Endang Afriyeni dan Eva Yoyet

Analisis *Non Market Capability,* Lingkungan, Strategi Diversifikasi, dan Kinerja: Studi pada Bank Umum di Jawa Timur dengan Menggunakan Statistik Deskriptif
Sabihaini dan Januar Eko Prasetio 363

Intensi Kewirausahaan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa di Lima Universitas di Indonesia)
Dwi Novitasari, SE.,MM dan Agusta Ika Prihanti Nugraheni, SE.,MBA 393

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, Terhadap Kepercayaan Konsumen di Pamela 3 Supermarket Yogyakarta
Eny Endah Pujiastuti dan Humam Santoso Utomo 401

CSR : Motif Sosial untuk Meningkatkan Citra Perusahaan
Sri Trisnaningsih dan Evi Malia 411

Pengembangan Model *Financial Distress Prediction* untuk Perusahaan-Perusahaan *Go Public:* Pendekatan Akuntansi, Pasar, Ekonomi Makro, dan Industri
Nilmawati dan Shinta Heru Satoto 419

Studi Eksploratori Profil dan SWOT Usaha Kecil Menengah Surabaya dan Sekitarnya
Lena Ellitan, Yulius Koesworo dan Tuty Lindawati 431

Corporate Sustainability Reporting
Meilan Sugiarto dan Indra Kusumawardhani 441

Identifikasi Variabel-Variabel Penentu Struktur Modal dan *Adjustment To Target Capital Structure: Trade-Off Theory*
C Ambar Pujiharjanto, Nilmawati dan R Hendri Gusaptono 447

Perilaku Pembelian Tak Terencana yang didasarkan pada Sikap Terhadap Uang dan Perencanaan Keuangan Pribadi
Yusepaldo Pasharibu, Maria Rio Rita dan Eristia Lidia Paramita 459

Pengembangan Model Keberterimaan Teknologi yang Menghasilkan Luaran Pemasaran (*Marketing Outcome*) pada UKM (*Survey* Pada Industri *Furniture* di Yogyakarta)
Surpiko Hapsoro Darpito, SE., MSi dan Ida Wiendijarti, S.Sos, MSi 467

Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Budaya Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi PTS di Jakarta Selatan
Tati Handayani dan Rosali 479

Ekowisata Sebagai Jendela Keberhasilan UMKM dalam Memperkokoh Perekonomian Menghadapi *Asean Economic Community* 2015
Istiana Rahatmawati dan Purbudi Wahyuni 491

Citra Perguruan Tinggi : Sudut Pandang *Trust, Sense of Ownership*, dan Komitmen, Kajian pada UPN "Veteran" Yogyakarta 499
Purbudi Wahyuni

Peluang dan Tantangan Keterlibatan Perempuan dalam Melestarikan Usaha Batik dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi dan Budaya (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) 507
Dra. Istiana Rahatmawati, M.Si.

Commitment Professional dan Norma *Subjective Manager* 511
Pribadi Widyatmojo, Sugiyanto, Karyono dan Chaula Anwar

Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Bank Pemerintah 525
Wiwiek Rabiatul Adawiyah

Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Perceived-Risk* (*Survey* pada Konsumen Mie Instan di Yogyakarta) 535
Sri Harjanti, SE, MSi

Gender dan Preferensi Risiko dalam Pengambilan Keputusan: Sebuah *Literatur Review* 543
Widyahayu Warmmeswara Kusumastati

EKONOMI

Struktur Upah Pekerja Non-Produksi, Produktivitas Pekerja dan Pertumbuhan Industri Manufaktur 551
I Ketut Nama dan Joko Susanto

Percepatan Pencapaian *MDG's* yang Berbasis *Partisipatory Rural Appraisal* (PRA) Melalui Pemberdayaan SDM 559
Dr. Boge Triatmanto, SE., MM., Dr. Eny Rachyuningsih, M.Si. dan Dr. Hariyanto Respati, SE., MM.

Kontribusi Komoditas Karet Terhadap Ekspor Indonesia dan Prospek Ekspor Karet Indonesia 569
Avi Budi Setiawan dan Sucihatiningsih DWP

Kegagalan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Model *trickle Down Effect* (Studi Kasus Indonesia) 575
Budiharjo dan I Ketut Nama

Strategi Pengembangan Usaha Melalui BUMDes untuk Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir 583
Dianto Mampanini

Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Korupsi di Indonesia
Edy Anan 881

Goncangan Harga Minyak Dunia Terhadap Pasar Modal Indonesia
Christopher Daniel dan Maria Rio Rita 891

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN, KELEMAHAN SPI, DAN KETAATAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN DIANALISIS DARI OPINI AUDITOR

Sucahyo Heriningsih, Rusherlistyani1
FE UPN "Veteran" Yogyakarta
email : heriningsih_s@yahoo.co.id.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the local government financial statement disclosure, the weakness of the SPI, and compliance with the law, in the analysis of the auditor's opinion. The sample of this study using 46 local government financial reports (LKPD) in Indonesia, in 2008 and 2010, which has an index of perception of corruption developed by Transparency International Indonesia. The results of this study (a) to prove that there is no difference in the disclosure of financial statements on local governments (LKPD) that received unqualified opinion, with the opinion LKPD not unqualified, (b) prove that there is no difference in compliance with the law of financial statements on local governments that received unqualified opinion, with which the opinion LKPD not unqualified, (c) prove that there is difference a weakness of the SPI on local government financial statements to obtain unqualified opinion, which the opinion LKPD not unqualified.

Keywords: *The local government financial statement disclosure, the weakness of the SPI, and compliance with the law, auditor's opinion.*

1. PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara diawali dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiscal, yang bertujuan untuk menciptakan *good governance* sehingga tercipta suatu pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dilakukan audit atas LKPD oleh pihak independent (BPK RI).

Semakin baik terciptanya transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat mengurangi praktek korupsi di pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas keuangan pemerintah, maka korupsi yang terjadi di daerah harapannya semakin berkurang. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Setiawan (2012) dan Heriningsih (2013), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah (opini audit, kelemahan Sistem pengendalian intern, dan ketidak patuhan

[1] Penelitian ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dibiayai oleh DIKTI RI, Hibah Bersaing 2014: Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. Peneliti menghaturkan terimakasih mendalam kepada DIKTI RI dan LPPM UPNVY.

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Maraknya kasus korupsi yang tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi banyak juga dilakukan oleh para birokrat, menjadikan fenomena yang menarik untuk diteliti. Hal ini tentunya tidak terlepas dari proses akuntabilitas yang di lakukan dan tingkat pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK, terdiri dari opini audit, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil audit BPK diharapkan dapat menunjukkan besarnya tingkat kecurangan maupun ada tidaknya kasus korupsi yang terjadi. Namun banyak terjadi bahwa opini WTP dan kepala daerahnya menjadi tersangka dalam kasus korupsi, sepeti yang diungkapkan oleh Abraham Samad (2012). Hal inilah yang menjadi catatan penting dalam akuntansi, terutama dalam proses pengungkapan atas LKPD. Pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan informasi tambahan seperti catatan atas laporan keuangan, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi tambahan diluar informasi keuangan.

Dengan adanya standar akuntansi pemerintah, maka laporan keuangan hendaknya disusun sesuai standar, peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi masih banyak fenomena yang terjadi opini auditor yang beropini tidak wajar dan disclamer. Hal ini terjadi karena banyak penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Demikian juga dengan LKPD yang memberoleh WTP apakah telah mencerminkan tingkat pengungkapan laporan keuangan yang baik dan sudah sesuai dengan standar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan, kelematahan SPI dan ketaatan terhadap perundang-undangan berbeda antara LKPD yang memberoleh opini WTP dengan yang selain WTP?"

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:

1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi).
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomi mikro.
3. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6. Pengungkapan lainnya.
7. Penutup.

Akuntabilitas Laporan Keuangan melalui Opini audit

Opini auditor merupakan point penting akan hasil audit dari auditor. Badan Pengawas Keuangan "BPK RI" bertugas mengawasi/memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan baik di pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, atau lembaga-lembaga Negara lainnya yang mengelola keuangan Negara. Hasil audit BPK dapat berwujut Laporan Hasil Pemeriksaan yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu laporan pemerintah daerah (LKPD).

Terdapat empat opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu *unqualified* (wajar tanpa pengecualian/WTP), *qualified* (wajar dengan pengecualian/ WDP), *adverse* (tidak wajar /TW), dan *disclamer* (tidak memberikan pendapat/TMP). Dari keempat opini tersebut opini terbagus adalah

unqualified yang berarti bahwa laporan LKPD telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terjelek adalah tidak wajar karena informasi laporan keuangan (LKPD) tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh penggunanya. Dan berbeda dengan *disclamer* terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), sehingga baik opini *adverse* maupun *disclaimer* tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan.(Heriningsih, 2013).

Sehingga dapat disimpulkan jika opini audit bagus, maka terdapat hubungan searah dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian Nanda, Debby, Sunardji dan Dyah (2012) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positip terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dari penjelasan keterkaitan opini audit dengan tingkat pengungkapan LKPD maka dapat di hipotesiskan:

H1: Terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah antara LKPD yang beropini WTP, dengan LKPD yang beropini selain WTP.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil audit BPK RI terhadap LKPD selain opini audit, juga menerbitkan hasil pemeriksaan atas Sistem pengendalian intern (SPI) untuk entitas yang diperiksa. Audit atas Sistem pengendalian intern (SPI) ini berisi tentang tingkat kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada suatu pemerintah daerah. Menurut PP No.8 Tahun 2006, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Hasil Audit BPK tentang SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai 1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2) kelemahan sistem penengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 3) kelemahan struktur pengendalian intern. (BPK, IHPS, 2013). Dari penjelasan keterkaitan kelemahan pada SPI dengan tingkat pengungkapan LKPD maka dapat di hipotesiskan:

H2: Terdapat perbedaan kelemahan pada SPI antara LKPD yang beropini WTP, dengan LKPD yang beropini selain WTP.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemberian opini yang ketiga juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I, tahun 2013 disebutkan bahwa salah satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan berupa laporan kepatuhan mengungkapan ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidak ekonomisan, ketidak efisienan, dan ketidakefektifan. (BPK, 2013)

a. Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai
b. Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
c. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional.
d. Temuan mengenai ketidakhematan
e. Temuan mengenai ketidak efisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

f. Temuan mengenai ketidak efektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome)

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas LK. Dari penjelasan keterkaitan kepatuhan pada perundang-undangan dengan tingkat pengungkapan LKPD maka dapat di hipotesiskan:

H3: Terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah antara LKPD yang beropini WTP, dengan LKPD yang beropini selain WTP.

3. METODE

Penelitian ini mengunakan data sekunder yang diambil dari BPS Indonesia. Berikut ini tabel pemilihan sampel sebagai berikut:

-------Tabel 1-----

Variabel Penelitian

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010.

Tingkat pengungkapan pada LKPD disesuaikan dengan tingkat pengungkapan pada PSAP. Tingkat pengungkapan ini diukur dengan menggunankan rumus sebagai berikut (Hilmi dan Martani, 2012) dalam (Heriningsih, 2013) :

$$\text{Indek pengungkapan LKPD} = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$$

Opini Audit

OpiniAuditdiukurmengunakanvariabeldummy. Laporan audit Independen merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria Standar akuntansi Pemerintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) diberi nilai *dummy* 1 dan kategori *non unqualified* yang terdiri dari Wajar dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion) diberi nilai *dummy* 0. (Heriningsih, 2013)

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Kelemahan SPI di ukur dengan menggunakan jumlah temuan pelanggaran atas SPI yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK.

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di ukur dengan menggunakan jumlah temuan pelanggaran atas ketaatan terhadap undang-undang yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Sampel yang diobservasi dalam penelitian ini berjumlah 92 LKPD untuk tahun 2008 dan 2010. Berdasarkan tabel 2,terlihat bahwa jumlah LPKD yang memperoleh opini WTP hanya 20 kota dan kabupaten, sedangkan yang memperoleh opini selain WTP (WDP, tidak wajar, dan disclamer) berjumlah 72 kabupaten dan kota.

-------Tabel 2 -------

Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD yang memperoleh opini selain WTP sebesar 0.8197 dan rata-rata tingkat pengungkapan yang memperoleh opini WTP sebesar 0.8000, dari hasil statistik menunjukkan bahwa secara statistik mempunyai hasil yang hampir sama atau tidak berbeda tingkat pengungkapan LKPD baik yang beropini WTP maupun yang tidak beropini WTP.

Rata-rata variabel kelemahan SPI untuk LKPD yang opini selain WTP sebesar 7,4026

dan rata-rata kelemahan SPI untuk LKPD yang ber opini WTP sebesar 6,7500, berdasarkan hasil statistik tersebut maka dapat dijelaskan bahwa untuk LKPD yang beropini WTP cenderung untuk memiliki tingkat kelemahan pada SPI lebih rendah bila dibandingkan dengan LKPD yang beropini selain WTP.

Rata-rata variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk LKPD yang opini selain WTP sebesar 9,8056 dan untuk LKPD yang beropini WTP sebesar 8,8500. Berdasarkan angka statistik tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa tingkat pelanggaran pada LKPD yang beropini WTP lebih rendah dibandingkan yang LKPD selain WTP.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengujian hipotesis 1, 2 dan 3 dengan menggunakan *Independen Sampel Test* terdapat dalam tabel 3.

-------Tabel 3-----

Berdasarkan tabel 3, angka signifikansinya sebesar 0,516 maka pengujian hipotesis 1 dapat disimpulan bahwa secara statistik dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan untuk LKPD yang beropini WTP dengan LKPD yang beropini selain WTP. Hal ini berari bahwa baik pemerintah daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaannya beropini WTP maupun yang LHP tidak memperoleh opini WTP cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan yang cenderung sama dalam pengungkapannya. Hal ini sesuai dengan hasil dari uji dekriptif dalam tabel 2, yang hampir tidak ada perbedaan jumlah rata-rata tingkat pengungkapannya, antara yang beropini WTP dengan LKPD yang selain WTP.

Untuk pengujian hipotesis 2, menunjukkan angka 0,046 maka kelemahan SPI untuk LKPD yang memperoleh opini WTP secara statistik berbeda antara kelemahan SPI dengan LKPD yang memperoleh opini selain WTP. Hal ini sesuai dengan hasil uji deskriptif di tabel 2 bahwa rata-rata kelemahan SPI untuk LKPD yang memperoleh opini WTP lebih rendah jika dibandingkan tingkat kelemahan dalam LKPD yang memperoleh opini selain WTP.

Untuk pengujian Hipotesis 3, hasil dari nilai signifikansinya sebesar 0,159 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 secara statistik tidak didukung. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan ketaatan terhadap perundang-undangan antara LKPD yang beropini WTP dengan LKPD yang memperoleh opini selain WTP.

Penelitian terdahulu yang melakukan uji beda tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, kelemahan SPI dan ketaatan terhadap perundang-undangan sepengetahuan peneliti belum ada, namun terdapat beberapa penelitian yang dapat mendukung analisis hasil penelitian ini. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Zul Hilmi dan Dwi M (2012) bahwa tingkat penyimpangan yang ditemukan BPK berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sementara dalam penelitian ini ketaatan terhadap perundang-undangan, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, tidak terdapat perbedaan secara statistik antara yang beropini WTP dengan yang selain WTP, sehingga bisa dikatakan penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang telah menguji pengaruh tingkat penyimpangan yang ditemukan BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) antara kabupaten dan kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan yang tidak memperoleh opini WTP, 2). terdapat perbedaan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) antara kabupaten dan kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan yang tidak memperoleh opini WTP, 3). tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) antara kabupaten dan kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan yang tidak memperoleh opini WTP.

DAFTAR PUSTAKA

BPK RI. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.

Hartatianti, Nur., Kusharyanti, Sucahyo Heriningsih. 2013. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Propinsi di Indonesia.* Prosiding Seminar Nasional Akuntansi 2 UPN "Veteran". Jakarta.

Heriningsih, Sucahyo., Marita. 2013. *Pengaruh Opini Audit dan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa).* Buletin Ekonomi. Volume 11, No.1, April. FE UPN. Yogyakarta.

Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani.2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.* FEUI.Jakarta

Ingram, Robert W. 1984. Economics Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research. Vol. 22.*

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Salemba Empat. Jakarta.

Lane, J.E. Routledge , London.

Laswad, Fawzi, Fisher, Richard, dan Oyelere, P. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy 24.*

Mahsun, Mohammad. Firma sulistyowati Heribertus Andre P. 2006. Akuntansi Sektor Publik.BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. (1984). Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure. *Journal of Accounting Research. Vol 24. No 2. pp 412-421.*

Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat koropsi Pemerintah daerah di Indonesia,* FE Undip.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

Populasi: total jumlah kabupaten dan kota 2008, 2010	484 kabupaten dan kota
Kota dan kabupeten yang memiliki indeks persepsi korupsi	50 kabupaten dan kota
Sampel kabupaten dan yang memiliki indeks persepsi korupsi selama tahun 2008-2010, serta data tersedia lengkap dari BPK dan BPS	46 kabupaten dan kota
Jumlah sampel yang di observasi	92 kabupaten dan kota

Tabel 2. Group Statistics

	opiniauditor	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tingkat pengungkapan	selain wtp	72	.8197	.21692	.02556
	wtp	20	.8000	.23337	.05218
SPI	selain wtp	72	7.4028	3.87720	.45693
	wtp	20	6.7500	2.63329	.58882
UU	selain wtp	72	9.8056	5.01726	.59129
	wtp	20	8.8500	3.19992	.71552

Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 3. Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Tingkat pengungkapan	Equal variances assumed	.425	.516	.354	90	.724	.01972	.05573	-.09100	.13044
	Equal variances not assumed			.339	28.770	.737	.01972	.05811	-.09917	.13861
SPI	Equal variances assumed	4.090	.046	.708	90	.481	.65278	.92260	-1.18013	2.48568
	Equal variances not assumed			.876	44.459	.386	.65278	.74532	-.84887	2.15443
UU	Equal variances assumed	2.020	.159	.806	90	.423	.95556	1.18611	-1.40086	3.31197
	Equal variances not assumed			1.029	47.840	.308	.95556	.92822	-.91092	2.82203

Sumber: Data diolah, 2014